

**POLEMIK DALAM PELAKSANAAN  
SISTEM PENDIDIKAN PANTJAWARDHANA TAHUN 1959 - 1965**

**AANG KURNIAWAN**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
E-Mail: aangnhb@gmail.com

**Sri Mastuti Purwaningsih**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Tahun 1959 pendidikan Indonesia sangat dipengaruhi oleh politik. Tekanan politik didapatkan karena keadaan negara berubah dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Hal tersebut membuat segala sektor harus berlandaskan Manipol termasuk dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan Pantjawardhana adalah implementasi Manipol dan USDEK dalam bidang pendidikan. Gerakan ideologis terjadi diluar pelaksanaan kurikulum. Gerakan ideologis muncul karena disebabkan permasalahan. Silang pendapat penafsiran sistem pendidikan pantjawardhana menjadi penyebab utama gerakan ideologis muncul. Permasalahan yang dijadikan masalah terdapat pada nilai dan asas yang dianggap kurang. Selama pelaksanaan Pantjawardhana, nilai moral Pantjatjinta muncul dan dipaksakan sejalan dengan Pantjawardhana. Alhasil, polemik membuat pendidikan “terpecah”, seperti terjadi di lembaga vital bidang pendidikan PGRI dan rusuh di Dept. P.D & K. Bipolarisasi terjadi di bidang pendidikan. Muncul dua golongan besar pendukung dan penolak Pantjawardhana dan Pantjatjinta.

**Kata Kunci : sistem pendidikan, pantjawardhana, kekuasaan struktural, polemik**

**Abstract**

*1959 Indonesian education is strongly influenced by politics. Political pressure is obtained because the state of the country changed from liberal democracy to guided democracy. This makes all sectors must be based Manipol included in the field of education. Pantjawardhana education system is the implementation of the Political Manifesto in education. Ideological movements occur outside of curriculum implementation. Ideological movement emerged because it caused problems. Disagreement interpretation pantjawardhana education system is a major cause of ideological movement emerged. The problems that made the issue is with the values and principles that are considered less. During the implementation of Pantjawardhana, moral values Pantjatjinta appear and enforced in accordance with Pantjawardhana. As a result, the polemic making education "split", as happened in the vital education institutions PGRI and chaos in the Dept. P.D & K. bipolarization occurred in the field of education. appeared two major categories supporters and opponents Pantjawardhana and Pantjatjinta.*

**Keywords: education system, pantjawardhana, structural power, polemic**

**PENDAHULUAN**

Dalam arus perubahan zaman, pendidikan selalu memegang peran sentral dalam menyelesaikan permasalahan di setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Diakui Edgar Faure (1973) bahwa persoalan pendidikan di banyak negara sangat luar biasa menantang dan sulit. Meski demikian negara mengakui bahwa pendidikan merupakan tugas negara yang paling penting.<sup>1</sup> Persoalan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia juga menempatkan pendidikan pada posisi penting dan strategis dalam Sejarah pemerintahan di Indonesia. Hal

inilah yang membuat 20% Anggaran Pendapatan Negara (APBN) saat ini diperuntukan untuk bidang pendidikan dan pengembangannya.

Di negara – negara berkembang terjadi “supremasi negara atas pendidikan”, yakni campur tangan negara yang terlalu besar atas masyarakatnya di sektor pendidikan.<sup>2</sup> Faktor pendukung yang paling dominan adalah ketika negara tersebut masih dalam proses berkembang, mengejar ketertinggalan, dan predikat sebagai negara yang memiliki ketergantungan terhadap negara lain yang jauh lebih maju baik dari segi teknologi dan sumber daya manusia. Penguasaan pemerintah atas pendidikan yang tercermin dari sistem pendidikan nasional yang terbentuk, akan mengarahkan negara

<sup>1</sup> Agus Salim, “Pendidikan dan Penguatan Basis Negara”, dalam *Indonesia Belajarlah! Membangun Pendidikan Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 89.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

terhadap kepentingan nasional dan secara tidak langsung ideologi dan pemikiran para pembuat kebijakan dan pemimpin negara tersebut. Dari segi substansi pendidikan, kurikulum dan materi pelajaran tampak tertuang sebagai kebijaksanaan pemerintah yang digulirkan melalui aparat birokrasi yang sentralistik.<sup>3</sup> Situasi dan kondisi yang seperti ini dialami Indonesia pada masa setelah kemerdekaan pada tahun 1945, khususnya pada masa pemerintahan Soekarno.

Pada masa Soekarno, setelah Dekrit Presiden yang diumumkan pada 5 Juli 1959, disusul pidato Presiden Soekarno pada peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” maka seluruh arah kebijakan dalam negeri baik yang menyangkut urusan negeri dan swasta atau asing harus dilakukan berlandaskan Manifesto Politik atau lazim disebut Manipol.<sup>4</sup> Hal ini juga secara otomatis dalam bidang pendidikan. Pendidikan pada saat itu harus melaksanakan program dari Manifesto Politik ditambah USDEK yang telah di cetuskan Presiden Soekarno.<sup>5</sup> Sistem pendidikan pun dibentuk oleh Presiden dan Menteri Muda urusan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan yang kita kenal dengan nama Sistem Pendidikan Pantjawardhana.

Tiga kerangka dasar revolusi yang diterapkan dalam Manipol yang menjadi dasar pembentukan Sistem Pendidikan Pancawardhana. Kerangka-kerangka itu berisi cita-cita dalam negeri termasuk juga revolusi dalam politik luar negeri Indonesia.

1. Pembentukan suatu Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan dan negara kebangsaan yang memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke.
2. Membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materiil juga spritual di dalam wadah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Melaksanakan kerja sama dan persahabatan dengan negara-negara luar khususnya negara Asia-Afrika dengan rasa saling menghormati satu sama lain dan dengan tujuan bersama membentuk dunia baru yang terhindar dari Kolonialisme dan Imperialisme menuju perdamaian dunia.

Berdasarkan tiga kerangka revolusi, sistem pendidikan Pancawardhana dianggap memiliki hakikat yang sangat dalam terhadap kerangka revolusi Indonesia. Sistem

pendidikan ini disiapkan untuk menumbuhkan jiwa nasioanalitik kuat kepada para peserta didik.

Pada perkembangan selanjutnya, gagasan sistem Pendidikan Pancawardhana yang disusun dan proses penerapannya mengalami banyak polemik bahkan pro dan kontra terjadi di masyarakat luas. Sebagian kalangan mengatakan setuju dan pro terhadap sistem pendidikan Pancawardhana karena tujuan dan hakikat dalam sistem pendidikan ini merupakan sebuah langkah maju yang harus di dukung untuk mewujudkan revolusi Indonesia dan membentuk generasi kuat sebagai pondasi bangsa yang mencintai negerinya. Namun, juga ada kalangan yang kontra karena menganggap Pancasila lebih tepat sebagai asas pendidikan ketimbang asas dan nilai dari Sistem Pendidikan Pancawardhana. Hal ini diperparah dengan kecurigaan masyarakat pada Lembaga Pendidikan Nasional (LPN) yang pada saat itu sangat dekat dengan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. LPN dianggap telah disusupi dan berafiliasi dengan Parta Komunis Indonesia (PKI) yang memiliki maksud dan tujuan lain.

Belum teridentifikasinya secara rinci tentang polemik dari gagasan Sistem Pendidikan Pantjawardhana yang membuat peneliti melaksanakan penelitian untuk mengurai bagaimana polemik yang terjadi terhadap pelaksanaan Sistem Pendidikan Pantjawardhana khususnya di tahun 1959 hingga 1965. Dalam artikel jurnal ini penulis akan lebih khusus membahas gerakan ideologis yang terjadi selama pelaksanaan sistem pendidikan Pantjawardhana yang terjadi tahun 1959 – 1965.

## METODE

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan sesuai dengan kaidah keilmuan maka penelitian ini akan menggunakan Metode Penelitian Sejarah. Metode penelitian sejarah adalah suatu proses menguji dan mengalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>6</sup> Tahap dalam penelitian menggunakan Metode Penelitian Sejarah ini adalah Heuristik, Kritik, Intepertasi dan diakhiri dengan Historiografi.

Pada tahap *heuristik*, hal pertama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari sumber sebanyak-banyaknya baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pendidikan Pantjawardhana dan polemik pelaksanaannya. Proses pencarian dan pengumpulan data didapatkan dengan melacak sumber-sumber di berbagai tempat. Sumber-sumber diperoleh peneliti dari Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, Perpustakaan Daerah Jawa

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Umasih, “Penyusupan Komunisme dalam Pelaksanaan Pendidikan Pancawardhana”, kumpulan makalah dalam Konferensi Nasional Sejarah IX dalam buku *Historitas Kebangsaan dan Demokrasi*, (Jakarta: Depdikbud, 2013), hlm. 219.

<sup>5</sup> Usdek meliputi 1. Undang-Undang dasar 1945, 2. Sosialisme Indonesia, 3. Demokrasi Terpimpin, 4. Ekonomi Terpimpin, 5. Kepribadian Indonesia

<sup>6</sup> Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya : Unesa University Press, 2005) .Hlm. 7

Timur, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, dan Perpustakaan Medayu Agung Surabaya.

Setelah mendapatkan data dari sumber Sejarah. Peneliti akan melakukan pengujian sumber dan penyeleksian sumber yang didapatkan. Pengujian sumber akan dilakukan dengan dua cara yaitu secara intern untuk menguji isi sumber dan ekstern untuk menguji apakah sumber tersebut merupakan sumber primer atau turunan bahkan sumber palsu yang dapat membahayakan penulisan. Pengujian dan penyeleksian ini bertujuan untuk mencari sumber primer yang koheren.

Selanjutnya tahap ketiga peneliti akan membaca dan memahami sumber yang telah koheren baik itu sumber primer dibantu dengan sumber sekunder dengan seksama. Membaca dan memahami dengan betul untuk selanjutnya akan menghubungkan antar fakta yang ada kemudian dari situ peneliti akan bisa menafsirkan sumber yang telah didapat. Dalam penelitian Sejarah, keterpaduan interpretasi dari berbagai sumber sejarah yang telah melalui tahap Kritik sumber Sejarah ditambah analisis mengenai konteks zaman peristiwa tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari sebuah peristiwa Sejarah.

Dalam menganalisis sumber sejarah yang didapatkan sebelum menuliskannya dalam *historiografi*, penulis akan menggunakan metode analisis pada beberapa bagian dari hasil penelitian ini. Metode analisis *domain* akan digunakan pada tulisan ini untuk menguraikan secara umum gerakan ideologis yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan sistem pendidikan Pantjawardhana.

Analisis *domain* atau analisis ranah merupakan analisis awal yang bersifat holistik atau menyeluruh untuk menemukan kesimpulan awal dari sumber yang didapatkan. Analisis *domain* terdapat pada 12 langkah penelitian yang disebutkan oleh James Spradley, analisis domain digunakan untuk menjelaskan pengertian tentang kategori konseptual dari informasi yang didapat dari sumber atau informan.<sup>7</sup> Setelah mengetahui kesimpulan awal dari sumber sejarah yang didapatkan maka selanjutnya penulis akan mendiskripsikan temuan tersebut dalam suatu penjabaran dan penjelasan. Struktur ranah atau *domain* terdiri dari pertama, *cover term* atau bisa disebut sebagai kategori utama dari suatu pengetahuan yang didapat dan kedua adalah, *include term* atau bisa disebut bagian – bagian dan nama – nama yang membentuk *cover term*.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> James Spradley, *Participant Observation*, (New York : Holt, Rineheart and Wiston, 1980), Hlm. 103.

<sup>8</sup> Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan (Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi)*, (Sleman : Pustaka Widyatama, 2006), Hlm. 176.

## PENDEKATAN PENELITIAN

Selain metode penelitian sejarah dan metode analisis pada beberapa bab penelitian terdapat pendekatan yang digunakan sebagai kerangka konseptual dan teori dalam penelitian ini untuk pondasi dan alat mempertajam analisis dan pembahasan.

Bangunan utama sebagai kerangka konseptual yang digunakan adalah hegemoni. Hegemoni yang akan digunakan sebagai dasar dalam membantu analisis dan mempertajam analisis fakta penelitian adalah pengertian hegemoni secara umum sebagai landasan bahwa pendidikan saat itu telah terhegemoni kepentingan negara dan banyak pihak. Sebagai alat analisis akan digunakan teori dan pendapat dari Johan Galtung yaitu teori dan pendapatnya mengenai kekuasaan struktural. Hegemoni dan kekuasaan seperti kita tahu memiliki hubungan timbal balik, bahwasannya kekuasaan dan ideologi bisa membentuk sebuah hegemoni yang utuh baik terhadap negara maupun terhadap pemikiran suatu individu.

Johan Galtung adalah seorang sosiolog konflik dan aktivis perdamaian yang menyoroti relasi dan hubungan antar individu, antar kelompok bahkan antar negara. Johan Galtung mengkritik dengan pedas dalam pendapat dan pemikirannya atas terjadinya konflik bahkan perang yang terjadi akibat gesekan baik antar individu, kelompok bahkan melibatkan negara. Pendapat dasarnya yang menjadi rujukan jika membicarakan konflik dan perdamaian adalah adanya hubungan antar manusia, kelompok bahkan negara yang tidak pernah bersih dari muatan kepentingan, kekuasaan, gesekan dan permusuhan bahkan penindasan. Hubungan tersebut bisa menjadi sebuah gesekan berbentuk fisik atau perang maupun gesekan pendapat dan pertentangan ideologi atau pemikiran terhadap sebuah kepentingan dan perebutan kekuasaan.

Pandangan Johan Galtung atau pendapatnya mengenai definisi perebutan kekuasaan terutama kekuasaan struktural berangkat dari pandangan Galtung yang melihat makna dari kekuasaan itu sendiri. Galtung melihat kekuasaan (*power*) sebagai konsep yang paling dasar dan kaya dalam ilmu politik, dikatakan mendasar karena mendasari relasi – relasi sosial.<sup>9</sup> Kekuasaan terjadi dalam pola – pola hubungan antar manusia dan bahkan antar negara. Yang menjadikan pertanyaan apakah semua hubungan dan relasi antar manusia maupun antar negara dapat dikatakan sebagai sebuah kekuasaan ?

Menurut Galtung, relasi yang eksploitatif dan represiflah yang disebut sebagai suatu relasi kekuasaan.<sup>10</sup> Relasi atau hubungan yang eksploitatif dari satu individu ke individu lain atau dari satu kelompok ke kelompok

<sup>9</sup> Marsana Windhu Marsana Windhu, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta : Kanisius, 1992).hlm. 33.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

lainbahkan kelompok kepada negara maupun sebaliknya yang disebut kekuasaan dan juga persoalan dalam kekuasaan. Hal ini yang dipandang Galtung sering menyebabkan terjadi perebutan untuk memperebutkan supermasi yang eksploitatif dan represif. Dengan demikian, kekuasaan dan perebutan supremasi kekuatan untuk mengeksploitasi menjadi nyata dalam hubungan sosial yang tidak seimbang. Ini mengimplikasikan ada yang kuat dan ada yang lemah atau bahkan memiliki kekuatan yang sama besar untuk mendapatkan relasi yang lebih atau untuk mengeksploitasi suatu objek. Perlu ditambahkan bahwa selama belum ada relasi, kekuasaan itu belum terjadi.<sup>11</sup>

Setelah membahas pandangan dasar Johan Galtung dalam memaknai kekuasaan, pendapat Galtung yang akan dijadikan fokus dalam kerangka konseptual ini adalah pandangannya mengenai kekuasaan struktural. Analisis mendalam akan diperlukan untuk melihat pandangan Johan Galtung mengenai kekuasaan struktural dan relevansi terhadap dunia pendidikan dimana pendidikan hanya akan dijadikan sebuah alat untuk persaingan memperebutkan kekuasaan dan bermuara terhadap hegemoni kepentingan serta hegemoni ideologi.

Menurut Galtung kekuasaan struktural bukanlah suatu yang ditemukan di dalam negara yang paling berkuasa, bukan pula diluar negara yang kurang berkuasa.<sup>12</sup> Selain negara, kekuasaan struktural juga tidak dapat dilihat dari kelompok atau individu yang memiliki kedudukan dan kekuatan di dalam struktural ataupun kelompok yang tidak memiliki kedudukan tersebut. Kekuasaan struktural ada namun bersifat abstrak, memiliki akibat yang dapat dirasakan secara nyata dalam realita kehidupan dan hubungan sosial. Kekuasaan struktural dibangun di dalam struktur.<sup>13</sup> Maka untuk mengidentifikasi kekuasaan struktural secara utuh termasuk persaingan dalam memperebutkannya terdapat empat komponen untuk diidentifikasi. Empat komponen ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dalam melihat kekuasaan dalam struktural serta persaingan dalam mendapatkan kekuasaan tersebut. empat komponen tersebut ialah *Eksplorasi*, *Penetrasi* (Pengaruh), *Fragmentasi* (Cara), *Marginalisasi* (Keretakan yang diakibatkan).

**Gerakan Ideologis Dalam Pelaksanaan Sistem Pendidikan Pantjawardhana**

No	Kategori	Golongan Pendukung Sistem Pendidikan Pantjawardhana	Golongan Penolak Sistem Pendidikan Pantjawardhana
1.	Dasar Pendidikan	Manipol + Usdek Sebagai Kristalisasi dari Pancasila	Berpegang teguh pada Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Nasional dan Manipol – Usdek sebagai garis pelaksanaanya
2.	Sitem Pendidikan	Pantjawardhana dan Pantjatjinta sebagai sistem yang saling melengkapi satu sama lain	Pendidikan berdasarkan Pancasila, dapat menerima Pantjawardhana namun, Pantjawardhana yang murni tanpa embel – embel Pantjatjinta dan menuntut perbaikan dari segi asas dan kurikulum
3.	Konten Kurikulum	Berlandaskan Pantjawardhana dengan isis moral Pantjatjinta yang saling melengkapi	Pancasila sebagai pokok kurikulum dan pantjawardhana murni tanpa embel – embel Pantjatjinta (Pantjawardhana yang diembeli Pantjatjinta dianggap penyelewengan terhadap pancasila)
4.	Pelaksanaan	Memaniopol Usdekan seluruh elemen pendidikan termasuk	Berlandaskan Pancasila dalam setiap kegiatan pendidikan, serta Manipol

<sup>11</sup> *Ibid.*,  
<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 41.  
<sup>13</sup> *Ibid.*,

	sekolah, engajar dan pendidik untuk menyiapkan revolusi dengan Pantjawardhana sebagai sistem pendidikan	Usdek dan Pantjawardhana murni sebagai jalan menuju tercapainya revolusi
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

**a. Golongan Yang Menolak Adanya Pantjawardhana Sekaligus Nilai Pantjatjinta**

Reaksi penolakan semakin deras mengalir dimulai tahun 1962 hingga 1965. Reaksi penolakan terhadap Pantjawardhana dan Pantjatjinta banyak disuarakan dari golongan kritis akademisi dan dari kalangan religi yang merupakan salah satu dari tiga kekuatan besar pada saat itu yang mencerminkan Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Alasan utama penolakan terhadap Pantjawardhana sekaligus Pantjatjinta yang terus gigih disuarakan oleh Lembaga Pendidikan Nasional adalah karena menganggap baik Pantjawardhana maupun Pantjatjinta tidak mencerminkan Pancasila dalam realisasi maupun unsur nilai dan asas yang ada di dalamnya.

Sebagai langkah penegasan Pancasila sebagai dasar pendidikan Nasional diadakan seminar dan musyawarah Pancasila sebagai satu – satunya dasar pendidikan Nasional yang dilaksanakan dan dihadiri berbagi kalangan termasuk dari kalangan nasionalis, Islam, Katolik Protestan dan berbagi lembaga seperti Front Marhenais dan partai Nasionalis seperti PNI, dan lain lain. Musyawarah ini dilaksanakan untuk mempertegas bahwa Pancasila adalah dasar dan satu satunya untuk pelaksanaan pendidikan untuk mencetak lulusan warganegara Pancasila, yang memiliki jiwa Nasionalis, patriotik dan pejuang komplit. Oleh karena itu, usaha atau tindakan yang akan mengabaikan atau mengaburkan nilai Pancasila, harus kita anggap sebagai penyelewengan daripada dasar pendidikan nasional dan harus diberantas dan dicegah oleh segenap pembela Pancasila dan semua kekuatan yang hendak mengamankan Pancasila.<sup>14</sup>

Sementara itu, selain dikalangan akademisi yang dijelaskan pada bab sebelumnya banyak juga organisasi di masyarakat luas yang menyuarakan penolakannya terhadap Pantjawardhana apalagi nilai Pantjatjinta yang dikeluarkan Lembaga Pendidikan Nasional. Kebanyakan organisasi tersebut berlatarbelakang agama namun, juga tidak sedikit yang berlatarbelakang nasionalis. Penolakan

tersebut lebih besar didasarkan pada asas dua sistem tersebut yang tidak mencerminkan dasar negara Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Pantjawardhana dan Pantjatjinta juga dinilai secara terang – terangan tidak merealisasikan Pancasila dalam pelaksanaannya di lapangan pendidikan, namun justru ada usaha untuk menghilangkan secara perlahan dan mengaburkan nilai Pancasila.

Garis terkeras dalam upaya menolak adanya nilai Pantjatjinta di dalam Pantjawardhana dan menuntut untuk melakukan revisi atas kekurangan asas yang dimiliki Pantjawardhana datang dari golongan Agama. Seperti yang dilakukan oleh PERGUNU (Persatuan Guru Nadhalatul Ulama). Organisasi tersebut menolak dengan keras adanya nilai Pantjatjinta ke dalam sistem pendidikan Pantjawardhana karena dianggap bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan memaksa Presiden Soekarno agar melarang Pantjatjinta dan merivisi sepenuhnya Pantjawardhana. Selanjutnya PERGUNU juga memberikan instruksi kepada seluruh anggota PERGUNU Djawa Timur diserukan agar lebih mempertajam kewaspadaan menghadapi golongan yang ingin memecah belah persatuan nasional, terutama dalam bidang pendidikan.<sup>15</sup>

Reaksi penolakan juga datang dari golongan Ansor dan PMII. Mereka menolak adanya Pantjatjinta dalam Pantjawardhana dengan alasan yang sama bahwa Pantjatjinta berusaha merusak nilai Pancasila serta memperkeruh sistem pendidikan Pantjawardhana yang kurang lengkap dari segi nilai dan asas. Pantjatjinta merupakan tindakan tidak lain berlawanan dengan prinsip musjawarah, suatu anarki, dan jelas merupakan tindakan merongrong revolusi dan menyebarkan penyakit dalam dunia pendidikan.<sup>16</sup> Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Tegal serta di media dan surat kabar. Surat kabar berbasis agama khususnya Islam juga menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap Pantjatjinta khususnya seperti Duta Masyarakat milik Nadhalatul Ulama. Bahkan harian surat kabar Duta Masyarakat dalam tadjuk rencannya menyebutkan, bahwa niatan sesungguhnya Pantjatjinta adalah untuk menggeser Pancasila, adakah kedjahatan yang lebih besar yang bisa diperbuat orang di negeri ini dari mentjemarkan Pantjasila.<sup>17</sup> Selama tahun 1964 media surat kabar yang berbais Islam terus menyoroti dan menyuarakan penolakannya terhadap Pantjatjinta dan sekaligus Pantjawardhana apabila nilai Pantjatjinta terus dipaksa dimasukkan dalam sistem pendidikan.

<sup>15</sup> “PERGUNU Desak Presiden Agar Pantjatjinta Dilarang”, *Duta Masyarakat*, Sabtu 11 Juli 1964

<sup>16</sup> “Ansor dan PMII Siap Ganjang Aksi Sefihak dan Pantjatjinta”, *Duta Masyarakat*, Selasa 7 Juli 1964

<sup>17</sup> “Larang Pantjatjinta”, *Tadjuk Rencana Duta Masyarakat*, *Ibid*.

<sup>14</sup> “Pendidikan Nasional Harus Bersumber Pada Nilai – Nilai Pantjasila”, *Suluh Indonesia (Sulindo)*, 17 Juli 1964, hlm. 2.

Selain golongan Islam, penolakan golongan agamis terhadap nilai Pantjatjinta yang terus diusahakan masuk ke dalam sistem pendidikan Pantjawardhana juga datang dari Pemuda Katolik Jawa Barat. Mereka menolak Pantjatjinta sebagai dasar pendidikan nasional dan tetap berkeyakinan bahwa Pancasila adalah satu –satunya dasar pendidikan nasional.<sup>18</sup> Pernyataan tersebut dilakukan di Bandung dalam pertemuan besar ikatan pemuda katolik Jawa Barat. Mereka mendukung penuh revolusi Indonesia dan pembentukan manusia sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan Pantjatjinta dan justru mencurigai ada maksud lain dari nilai Pantjatjinta yang dengan keras diusahakan masuk ke dalam sistem pendidikan Pantjawardhana.

Kalangan nasionalis juga berdiri bersama golongan agama untuk menolak nilai Pantjatjinta dan Pantjawardhana apabila Pantjatjinta tetap kukuh dimasukkan ke dalam sistem pendidikan Pantjawardhana. Partai besar PNI adalah salah satu yang menolak dengan rencana tersebut. PNI menyatakan bahwa intruksi pimpinan Dept. P.D & K tentang Pantjawardhana dan usahanya untuk memasukkan Pantjatjinta ke dalam sistem pendidikan merupakan penyelewengan terhadap pancasila.<sup>19</sup> PNI menyebutkan ada delapan alasan bahwa sistem pendidikan Pantjawardhana dan Pantjatjinta telah menyeleweng dari Pancasila. Salah satunya adalah poin no empat yang menyebutkan, Pantjawardhana yang menyatakan hanya ada lima perkembangan merupakan pemaksaan agar bisa disebut sebagai “*pantja*” sedangkan jika diteliti lebih lanjut lebih dari lima segi yang harus dikembangkan, ini berarti suatu usaha untuk membingungkan umum.<sup>20</sup> PNI juga menganggap bahwa Pantjawardhana berusaha untuk mendegradasi dan menurunkan derajat nilai Pancasila dengan cara meletakkan nilai Pancasila hanya sebagai sebuah nilai filosofi belaka dari manusia dan masyarakat Indonesia bukan sebagai nilai dasar dalam melaksanakan kehidupan berbangsa melainkan hanya nilai yang berdiri sendiri atau dengan kata lain hanya sebuah filosofi belaka.

Gerakan penolakan juga disampaikan oleh DPP GSNI (Gerakan Siswa Nasional Indonesia) serta Lembaga Kebudajaan Nasional Kalimantan Barat (LKN KALBAR). Kedua organisasi tersebut menolak Pantjatjinta dan nilai Pantjatinggi yang dikeluarkan LPN dan PKI serta usaha memasukkan kedua nilai tersebut ke dalam Pantjawardhana serta menuntut untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pendidikan Pantjawardhana. Bahkan tuntutan selebihnya adalah untuk membubarkan

Mapenas (Majelis Pendidikan Nasional) dan membentuk Mapenas baru yang berisikan orang-orang yang taat kepada Pancasila.<sup>21</sup> Seruan juga disampaikan untuk terus waspada dan melawan pemecah belah dan kaum rekasioner yang ingin “menggerowoti” Pantjasila sebagai asas dan falsafah negara.<sup>22</sup>

Rasa sakit hati dan penolakan juga disampaikan Pimpinan dan pengurus organisasi Taman Siswa, organisasi yang sejak awal pergerakan nasional khusus memperhatikan masalah pendidikan. Rasa sakit hati tersebut disampaikan pimpinan Taman Siswa atas pernyataan menteri Prijono serta menyatakan bahwa Taman Siswa juga berusaha disusupi oleh Pantjatjinta. Seluruh pimpinan Majelis Luhur Taman Siswa merasa tersinggung sekali atas utjapan Menteri bahwa Pantja Dharma Taman Siswa tidak ada Ke – Tuhanan.<sup>23</sup> Hal ini didasarkan atas pernyataan menteri Prijono dalam konferensi didepan kepala dinas perwakilan Dept. P & K seluruh Indonesia pada 22 Djuni 1964. Menteri Prijono menyebutkan bahwa Pantjawardhana dan Pantjatjinta saling melengkapi dan merasa lucu bahwa dalam asas Taman Siswa pun tidak disebutkan Ketuhanan kenapa Pantjawardhana dan Pantjatjinta yang disoroti. Pernyataan menteri Prijono ini membuat marah pimpinan Taman siswa Nji Hajar Dewantara dan menjelaskan bahwa Pantja Dharama Taman Siswa terdiri dari (1. Kodrat Alam, 2. Kebudajaan, 3. Kemanusiaan, 4. Kekeluargaan, 5. Kemerdekaan) dan asas pertama Kodrat Alam telah menempatkan posisi Ketuhanan diatas segala – galanya. Nji Hajar Dewantara juga menyebutkan ada beberapa oknum Taman Siswa yang berusaha pula untuk memaksa menerima nilai Pantjatjinta dan menerima Pantjawardhana yang masih menjadi polemik dalam pendidikan. Untuk mengatasi hal ini Nji Hajar Dewantara telah bertindak tegas terhadap oknum - oknum yang merongrong Taman Siswa dengan jalan mengeluarkannya dari Taman Siswa.<sup>24</sup>

PGRI daerah yang sebelumnya diombang – ambing atas pecahnya dua kubu PGRI juga menyatakan reaksinya dalam menolak Pantjatjinta dan sistem pendidikan Pantjawardhana. Beberapa PGRI daerah yang masih setia dengan Pancasila serta Manipol dan USDEK menolak dengan keras adanya Pantjatjinta serta mengecam usaha memasukkan nilai Pantjatjinta kedalam sistem pendidikan Pantjawardhana. Seperti yang dilakukan PGRI seluruh Kalimantan yang menolak untuk

<sup>21</sup> “Larang Pantjatjinta! Laksanakan Dengan Konsekwen Pendidikan Agama”, *Duta Masjarakat*, Rabu 1 Juli 1964

<sup>22</sup> “Segera Tindak Golongan Pantjatintais dan Pantjatinggiis”, *Duta Masjarakat*, Sabtu 4 Juli 1964

<sup>23</sup> “Pimpinan Taman Siswa Merasa Tersinggung Dengan Utjapan Menteri Prijono Djuga Taman Siswa Ditjoba Dimasuki Pantja Tjinta”, *Duta Masjarakat*, Jum’at 10 Juli 1964

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> “Pemuda Katolik Djawa Barat Menolak Pantjatjinta, *Duta Masjarakat*, Kamis 2 Djuli 1964

<sup>19</sup> “Pantja Wardhana & Pantjatjinta, Penjelewenagn Terhadap Pantjasila”, *Suluh Indonesia*, 3 Agustus 1963

<sup>20</sup> *Ibid.*,

menerima Pantjatjinta serta usaha memasukkan nilai Pantjatjinta kedalam sistem pendidikan Pantjawardhana. PGRI seluruh Kalimantan hanya akan mengakui dan mengamalkan Pantjawardhana asli jaitu Pantjawardhana yang tidak diembel – embeli dengan apa jang dinamakan moral Pantjatjinta , sesuai Intruksi Menteri PDK No. 2 tanggal 17 Agustus 1962.<sup>25</sup>

Reaksi PGRI daerah yang menolak adanya nilai Pantjatjinta serta menuntut disempurnakannya Pantjawardhana juga dismapaikan oleh PGRI daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dimana kedua daerah tersebut merupakan basis dari PGRI Non-Vaksentral yang mendukung Pantjatjinta dan Pantjawardhana dengan dukungan PKI di belakangnya. Usaha yang mereka lakukan adalah dengan melakuan reorganisasi di tubuh PGRI di daerah untuk menyingkirkan kaum reaksioner yang berusaha memasukkan dukungannya terhadap nilai moral Pantjatjinta yang dianggap bertentangan dengan falsafah Pancasila. Dengan dipelopori oleh guru –guru dari Tulungagung, maka daerah Surabaya Smapai Nganjuk ditambah Malang telah melakukan reorganisasi ditubuh mereka.<sup>26</sup> Selain di Djawa Timur djuga Djawa Tengah di Jogjakarta juga dilakukan reorganisasi dan mebentuk pengurs baru dan pimpinan baru, inilah njata – njata bahwa guru – guru progresip terang – terangan emoh Pantjatjinta.<sup>27</sup> Ini merupakan rekasi dan gerakan untuk memukul mundur kekuatan yang berusaha mendukung memasukkan nilai Pantjatjinta ke dalam sistem pendidikan nasional dan menganggap langkah ini merupakan langkah tepat untuk melindungi dasar negara falsafah Pancasila dari golongan yang berusaha untuk sedikit demi sedikit merubah bahkan menghilangkan Pancasila sebagai suatu dasar negara yang sah.

Rekasi penolakan baik di media dan surat kabar mengenai nila Pantjatjinta dan tuntutan untuk memurnikan serta merevisi Pantjawardhana karena menganggap kurangnya asas yang ada di dalamnya menjadi isu dan pemandangan luar biasa dalam dunia pendidikan saat itu. Sementara disisi lain ada rekasi menolak sudah pasti ada golongan dan gerakan yang mendukung penuh baik nilai moral Pantjatjinta maupun Pantjawardhana. Benturan fisik memang tidak terjadi dilapangan namun, saling serang pemikiran baik yang diutarakan melalui surat kabar maupun pertemuan musyawarah atau seminar menjadi hal yang disayangkan terhadap jalannya pendidikan. Meskipun pendidikan disekolah berjalan normal seperti biasanya namun, para guru sebagai pelaksana pendidikan menjadi bingung atas

kisruh yang terjadi di dunia pendidikan apalagi kuatnya suara yang Mendukung maupun menolak kedua nilai dan sistem tersebut.

#### **b. Golongan Yang Mendukung Adanya Pantjawardhana Sekaligus Nilai Pantjatjinta**

Disisi lain kuatnya reaksi penolakan terhadap sistem pendidikan Pantjawardhana dan nilai moral Pantjatjinta terus dilawan oleh kekuatan yang mendukung penuh kedua sistem dan nilai tersebut. Dukungan dilakukan dengan berbagai cara baik melalui media dan surat kabar maupun memperbanyak anggota dengan masuk ke dalam organisasi – organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan maupun mencari dukungan organisasi yang sangat pro dengan Manipol dan USDEK. Mereka menyuarakan bahwa Pantjawardhana adalah sistem pendidikan paling tepat untuk dilaksanakan untuk mensukseskan Revolusi Indonesia khususnya melalui pendidikan dan nilai Pantjatjinta merupakan nilai yang melengkapi dari nilai sistem pendidikan Pantjawardhana. Dengan kata lain baik Pantjawardhana maupun Pantjatjinta merupakan kedua hal yang saling melengkapi satu sama lain dan keduanya merupakan penjabaran dari Pancasila dengan garis Manipol dan USDEK dalam penjabarannya.

Sama seperti suara yang menolak dengan adanya nilai moral Pantjatjinta serta sistem pendidikan Pantjawardhana, kelompok yang mendukung juga memiliki alasan kuat untuk tetap melaksanakan dan mendukung sistem pendidikan Pantjawardhana dan nilai moral Pantjatjinta serta Pantjatinggi. Alasan utama tersebut karena baik Pantjawardhana, Pantjatjinta bahkan Pantjatinggi yang dikeluarkan PKI merupakan sistem pendidikan dan nilai yang tercetus karena kebutuhan akan perbaikan dan revolusi Indonesia yang multi kompleks bahkan telah disetujui oleh Presiden Soekarno. Maka tidak ada alasan untuk menolak sistem pendidikan Pantjawardhana karena kebutuhan akan dunia pendidikan serta telah direstui oleh pemimpin tinggi Revolusi Indonesia Presiden Soekarno.

PGRI yang sejak awal memang telah terpecah menjadi dua suara dan golongan akibat kisruh dalam pengurus besarnya membuat suara di tubuh PGRI pun juga terpecah. PGRI Djakarta sebagai contoh yang mendukung betul sistem pendidikan Pantjawardhana dan nilai moral Pantjatjinta dan menolak keputusan pengurus besar (PB PGRI Pusat). Mereka menyatakan menolak kebidjaksanaan PB – PGRI yang menentang Pantjawardhana sebagai sistem pendidikan nasional.<sup>28</sup> Dengan kata lain PGRI Djakarta menolak PGRI pimpinan M.E Subiadinata yang disebut sebagai PGRI

<sup>25</sup> “PGRI Seluruh Kalimantan Tolak Pantjatjinta”, *Merdeka*, 4 Djuli 1964

<sup>26</sup> “Menuju Masyarakat Sosialis Indonesia Berdasarakan Pantjasila Bukan Berdasarakan Pantjatjinta”, *Duta Masyarakat*, Minggu 5 Djuli 1964

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> “PGRI Djakarta tolak kebidjaksanaan PB-Nja”, *Berita Indonesia*, Selasa 19 Mei 1964

Vaksentral atau PGRI yang mendukung Pancasila sebagai satu – satunya dasar pendidikan. Mereka berpendapat, Pantjawardhana tidaklah bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan haluan negara Manipol/USDEK serta merupakan pula sistem dan alat yang tepat untuk penyelesaian Revolusi Indonesia dalam bidang pendidikan.<sup>29</sup>

Diluar organisasi PGRI yang memang telah terpecah menjadi dua golongan suara, dukungan terhadap sistem pendidikan Pantjawardhana dan nilai moral Pantjatjinta dari LPN juga datang dari Front Nasional. Front Nasional dari awal bertekad untuk mendukung penuh Pantjawardhana, Pantjatjinta dan LPN yang memiliki pemikiran progresip tentang pendidikan yang berlandaskan Manipol. Dalam sambutannya di Kongres Nasional Lembaga Pendidikan Nasional I pada 22 Juli 1962 sekjen Pengurus Besar Front Nasional menyatakan mendukung pendidikan nasional yang benar – benar bersifat nasional yang mengabdikan kepada kepentingan Revolusi dan Pembangunan Nasional. Front Nasional juga menyebutkan, paham individualisme masih banyak terdapat menonjol sedangkan persatuan dari semua kekuatan Revolusioner tidak bukan dan lain adalah dengan anak didik kita.<sup>30</sup> Dari sambutan yang diutarakan Sekjen Front Nasional dapat diartikan bahwa peserta didik merupakan kekuatan revolusioner yang besar yang harus disiapkan untuk mensukseskan Revolusi Indonesia.

Selain Front Nasional sebagai organisasi besar yang mendukung sistem pendidikan Pantjawardhana, PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai partai yang tumbuh besar di tahun – tahun 1959 hingga 1965 juga mendukung penuh Lembaga Pendidikan Nasional. Pantjawardhana dan Pantjatjinta dianggap merupakan sebuah terobosan besar dalam dunia pendidikan untuk membentuk insan yang progresip demi terwujudnya Revolusi Indonesia dan menghilangkan sisa – sisa Kolonialisme dan Feodalisme di Indonesia. PKI yang sejak awal berada dalam barisan utama dalam mengawal sistem pendidikan Pantjawardhana dan LPN mendukung penuh dengan apa yang telah LPN lakukan untuk menciptakan pendidikan yang revolusioner. PKI juga menyebutkan, cermin dari situasi objektif daripada perjuangan rakyat pada tingkat sekarang dibidang pendidikanpun terdapat perjuangan sengit yaitu antara kekuatan yang pro Manipol dan anti Manipol.<sup>31</sup> Oleh karena itu PKI mengajak semua elemen yang mendukung Manipol dan Revolusi untuk mengawal pendidikan yang telah terbentuk dan untuk mewujudkan cita-cita dalam

memberantas sisa – sisa kolonialisme yang masih berusaha mencengkeram bangsa Indonesia.

Pandangan PKI terhadap jalannya pendidikan nasional disampaikan Ketua CC PKI D.N Aidit dalam kongres I LPN yang menyatakan, bahwa pendidikan selalu memiliki watak tertentu dan tidak mungkin ada pendidikan yang bersifat universal yang berarti berlaku untuk segala keadaan dan setiap waktu.<sup>32</sup> Didalam situasi bangsa Indonesia saat itu, dikatakan D.N Aidit bahwa sisa – sisa Kolonialisme dan Feodalisme ditambah dengan neo-Kolonialisme berusaha mencengkeram bangsa Indonesia kembali dengan “kuku – kukunya” yang tajam. Maka, tidak bisa dan tidak lain harus melaksanakan pendidikan yang benar-benar nasional, kerakyatan dan ilmiah yang sepenuhnya mengabdikan kepada penyelesaian tuntutan – tuntutan Revolusi Agustus 1945 sampai ke akarnya.<sup>33</sup>

Tidak hanya dari organisasi besar seperti Front Nasional dan partai besar seperti PKI, dukungan juga datang dari organisasi lain yang bergerak dalam bidang pendidikan. Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia (IPPI) dan Serikat Buruh Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (SBPPK) juga menyampaikan dukungannya terhadap pendidikan yang Manipol terkhusus sistem pendidikan yang Manipol yaitu sistem pendidikan Pantjawardhana. IPPI bahkan menyatakan, Sapta Usaha Tama dan Pantjawardhana memuat unsur – unsur perjuangan dalam kehidupan pendidikan sesuai dengan manipol sekarang.<sup>34</sup> Pernyataan tersebut dipertegas oleh pimpinan pusat SBPPK yang mengatakan, bahwa kreasi konstruktif Menteri P.D.K Prijono yang terkenal dengan lima perkembangan pokok atau Pantjawardhana dan Sapta Usaha Tama cukup dijadikan mercusuar yang yang dapat menerangi peserta kongres, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dijadikan daya pendorong untuk mengantar pendidikan nasional kepantai tujuannya.<sup>35</sup> Tujuan yang dimaksudkan oleh SBPPK juga patut untuk dipertanyakan, apakah tujuan tersebut untuk membentuk lulusan yang memiliki jiwa Revolusi ataukah justru untuk membentuk dan mengarahkan pendidikan untuk mensukseskan program SBPPK dan organisasi lain yang memiliki kepentingan akan pendidikan.

Selain organisasi yang sudah mendukung terlaksananya sistem pendidikan Pantjawardhana dan juga dasar pendidikan LPN yang dikenal sebagai nilai moral Pantjatjinta, untuk memperluas dan menggaet dukungan diadakan pula seminar dan musyawarah pendidikan dengan hasil akhir pernyataan dukungan

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> “Sambutan : J.M Menteri / Sekjen Pengurus Besar Front Nasional”, *Pendidikan Nasional*, No 5 – 6, Tahun 1962. Hlm. 22.

<sup>31</sup> “Sambutan : J.M Menteri/Wakil Ketua M.P.R.S/Ketua C.C.P.K.I sdr. D.N Aidit”, *Pendidikan Nasional*, No 5 – 6, Tahun 1962. Hlm. 24.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> “Sambutan : Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia”, *Pendidikan Nasional*, No 5 – 6, Tahun 1962. Hlm. 25.

<sup>35</sup> “Sambutan Pimpinan Pusat SBPPK”, *Pendidikan Nasional*, No 5 – 6, Tahun 1962. Hlm. 27.

terhadap Pantjawardhana dan Pantjatjinta. Seperti yang dilakukan LPN pada tanggal 20 – 23 Januari 1962 di Surakarta yang mengumpulkan perwakilan guru teknik seluruh Indonesia dengan nama Seminar Pendidikan Teknik yang menghasilkan sebuah pernyataan untuk mendukung penuh sistem pendidikan Pantjawardhana sekaligus nilai moral Pantjatjinta. Seminar tersebut berpendapat, segi asas dan tujuan pendidikan yang berpangkal pada pokok – pokok pikiran untuk menjadikan anak didik kita manusia demokrat dan patriotik anti-Imperialisme dan feodalisme serta bercita-cita soialisme Indonesia.<sup>36</sup> Diadakanya seminar ini selain bertujuan menamkan nilai Revolusi dan Manipol kepada pengajar khususnya guru – guru teknik disisi lain juga merupakan usaha memperbesar dukungan terhadap pelaksanaan Pantjawardhana serta isi moral Pantjatjinta.

Dukungan – dukungan terus bertambah hingga tahun 1964 disaat situasi pendidikan mengalami polemik dan memuncak dibarengi oleh perpecahan di organisasi pendidikan. Seperti dukungan dari Gerakan Karyawan Guru Pancasila dari surat dukungannya tertanggal 12 Juli 1964. Gerakan Guru Karyawan Pancasila menghargakan setinggi – tingginya dan mendukung sepenuhnya keputusan DPAS yang telah menegaskan bahwa moral pendidikan adalah Pancasila/Manipol/USDEK dan sistem pendidikan nasional adalah Pantjawardhana yang masih harus disempurnakan.<sup>37</sup>

Polemik yang terjadi dengan terpecahnya beberapa organisasi besar dibidang pendidikan bahkan didalam tubuh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta pecahnya dukungan terhadap dasar dan arah pendidikan membuat situasi pendidikan saat itu berjalan alot. Di tataran bawah atau di daerah situasi seperti ini justru membuat pendidikan disibukkan dengan identifikasi dasar pendidikan yang dilakukan disekolah, bukan berfokus dalam pengajaran melainkan berfokus pada hal lain. Di daerah, baik yang mendukung Pantjawardhana dan Manipol maupun pendukung Manipol namun menolak Pantjawardhana semakin subversif. Seperti dokumen yang ditemukan di malang terdapat peristiwa yang menyebutkan seorang pastor bernama Joseph Wang dalam memberikan pelajaran tentang Komunisme, justru dianggap sebagai seorang yang anti manipol, dan Komunisto-Phobia. Joseph Wang dituduh menyebarkan virus Komunisto-Phobia dan tidak memahami bahwa Revolusi Indonesia berporoskan NASAKOM. Pernyataan ini dikeluarkan oleh PERHIMI (Persatuan Mahasiswa Indonesia) cabang malang

tertanggal 27 November 1964. Mereka menuntut, hendaknya yang berwajib segera mebersihkan dunia pendidikan dari para pengajar yang Pancasilais-Manipolis Munafik, Menikobuis, dan anggota partai terlarang serta kaum kontra revolusi agar generasi muda kita mendatang adalah manipolis dan Patriotis sejati.<sup>38</sup>

### c. Dampak Polemik dan Gerakan Ideologis Yang Terjadi

Persaingan kekuasaan struktural akan pendidikan yang terlihat pada pelaksanaan pendidikan pada tahun 1959 hingga 1965 memberikan dampak yang luas terhadap jalannya pendidikan saat itu. Dari pendapat Johan Galtung hal ini diibaratkan sebagai *marginalisasi* atau keretakan yang diakibatkan oleh proses eksploitasi, penetrasi atau pengaruh serta fragmentasi atau cara yang digunakan untuk memberikan pengaruh dan meligitimasi eksploitasi yang dilakukan dalam pendidikan. Pendidikan terlihat sebagai sebuah alat untuk menyerukan pendapat dan pandangan tentang sebuah konsep revolusi dan kepentingan sebuah ideologi. Meskipun hal tersebut bukan sebagai sebuah tujuan namun hal tersebut menggambarkan realitas yang terjadi dalam dunia pendidikan saat itu.

#### 1. Perpecahan Ditubuh PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)

Akar perpecahan PGRI sebenarnya jauh terjadi sebelum tahun 1962, sebelum Pantjawardhana ditetapkan pemerintah dan munculnya nilai Pantjatjinta yaitu pada tahun 1959. Kesulitan ekonomi yang dialami para pegawai negeri khususnya para guru pada masa itu telah dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui organisasi guru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).<sup>39</sup> PGRI dalam kongres ke-9 pada bulan Oktober 1959 menyatakan bahwa “mendwifungsikan” diri sebagai organisasi profesi guru dan serikat kerja guru. Dengan demikian, fungsi serikat kerja memudahkan jalan PKI untuk masuk lebih dalam di tubuh PGRI untuk mempengaruhi serta menyuarakan pandangannya terhadap pendidikan.

Memasuki kurun 1960 hingga 1961 ketika suasana pendidikan meningkat dengan kebutuhan akan adanya sistem pendidikan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan pengaruh PKI di tubuh PGRI semakin intensif. Infiltrasi untuk memasuki tubuh PGRI semakin gencar dilakukan baik melalui upaya mencari dukungan di dalam anggota PGRI maupun usaha merebut tampuk pimpinan PGRI. Ketua PGRI saat itu

<sup>36</sup> “Hasil Seminar Pendidikan Teknik P.B PGTI di Surakarta”, *Pendidikan Nasional*, No 1 – 2, Tahun 1962. Hlm. 19.

<sup>37</sup> Dokumen Pernyataan Gerakan Karyawan Guru Pantjasila, Djakarta 12 Djuhi 1964. Arsip Dr. Roeslan Abdul Gani : Arsip Nasional Republik Indonesia.

<sup>38</sup> Dokumen Pernyataan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PERHIMI) Tjabang Malang, Djakarta 27 November 1964. Arsip Dr. Roeslan Abdul Gani : Arsip Nasional Republik Indonesia.

<sup>39</sup> Umasih., *Op.Cit*, hlm. 227.

Subiadinata dengan segala upayanya menolak terhadap usaha – usaha yang dilaksanakan PKI di dalam tubuh PGRI. Usaha – usaha tersebut justru mendapat tentangan dari anggota yang telah beralih haluan dan mendukung PKI seperti Soebandri sebagai Ketua II menurut Kongres PGRI ke-9 tahun 1959.

Keadaan di dalam tubuh PGRI terus memanas menyusul kongres PGRI yang diadakan pada Oktober 1962. PKI yang menunjuk Soebandri sebagai calon ketua PGRI pada kongres ke-10 PGRI melakukan politik adu domba. Kongres PGRI ke-10 di Gelanggang Olah Raga Bung Karno pada 1962, Soebandri dan kawan – kawan kembali melakukan politik adu domba.<sup>40</sup> Ketua umum PGRI saat itu Subiadinata dituduh sebagai seorang yang anti manipol, anti revolusi, dan anti pemerintahan serta tuduhan yang lain. Soebandri dan pendukungnya termasuk PKI yang ada dibelakangnya masih gagal dalam merebut kursi kepemimpinan PGRI. Meskipun gagal menduduki jabatan sebagai ketua umum PGRI, konflik internal di dalam tubuh PGRI justru semakin terang – terangan terlihat.

Penyusunan juga dilakukan PKI terhadap anggota PGRI terutama guru – guru di daerah Jawa Barat meski sedikit jumlahnya yaitu 573 orang dari 80.000 anggota dan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlahnya lebih dari 2000 orang.<sup>41</sup> Konflik mulai menyebar tidak hanya di internal pengurus PGRI namun juga di kalangan anggota PGRI terlebih pada 17 Juli 1963 pengurus PGRI terpilih dari kongres ke-10 menghadiri musyawarah penegasan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional. Adanya musyawarah ini adalah reaksi dari Seminar Mengabdikan Manipol yang dilakukan LPN dan PKI pada Februari 1963. Hal ini membuat konflik yang terjadi di tubuh PGRI semakin membesar dan muncul ke permukaan.

Muljono dan Ichwani yang kecewa karena gagal dalam upaya mempengaruhi suasana Kongres PGRI 1962 dan menyaksikan pengurus besar PGRI tetap mempertahankan Dasar Pendidikan Nasional Pancasila, mengajukan nota pengunduran diri.<sup>42</sup> Langkah yang dilakukan dua orang ini kemudian dilanjutkan dengan Propaganda “Non – Vaksentral” kepada seluruh anggota PGRI di bawah dukungan PKI. Pada Juni 1964 anggota – anggota tersebut resmi memisahkan diri dan mendirikan PGRI Non-Vaksentral. PGRI Non-Vaksentral adalah PGRI yang mendukung pendidikan Manipol dan sepenuhnya mendukung sistem pendidikan Pantjawardhana dan nilai moral Pantjatjinta. Selanjutnya, bagi mereka yang masih berada dalam tubuh PGRI dan mendukung dasar pendidikan Pancasila disebut sebagai

PGRI Vaksentral. Kepada anggotanya, PGRI Non-Vaksentral menyerukan melakukan pemogokan, berdemonstrasi dan berkonfrontasi sebagaimana yang dilakukan buruh kepada majikannya.<sup>43</sup>

Pecahnya PGRI menjadi dua golongan memberikan pengaruh sangat besar dibidang pendidikan. Pendidikan khususnya tenaga pengajar atau guru yang awalnya sebagai garis terdepan untuk membentuk lulusan yang sesuai dengan jiwa Pancasila, Manipol dan Usdek dipaksa untuk membedakan mana “Teman” dan mana “Lawan”. Secara langsung hal ini memberikan kebingungan dikalangan pengajar tentang arus pendidikan saat itu. Dengan terpecahnya PGRI menjadi dua golongan, di daerah juga terimbas dengan pecahnya kesatuan PGRI daerah. Ada yang mendukung PGRI Vaksentral dengan pimpinan Subiadinata ada yang mendukung PGRI Non-Vaksentral dengan pimpinan Soebandri dan kawan-kawan namun, juga tidak sedikit yang menyangkan terpecahnya PGRI dan menyerukan persatuan kembali ditubuh PGRI.

Seperti yang dilakukan Rukun Kerja Sama (RKS) pegawai negeri yang berfokus pada perbaikan nasib pegawai negeri menyambut baik didirikannya PGRI Non-Vaksentral. RKS menyatakan sangat kecewa dengan tindakan reaksioner Subiadinata yang dianggap tidak mematuhi hasil kongres PGRI dan berusaha menentang Pantjawardhana yang telah jelas disetujui Presiden. Selain mengucapkan selamat atas berdirinya PB PGRI Non-Vaksentral, lebih jauh delegasi RKS pusat menyatakan bahwa tindakan pembentukan PGRI Non-Vaksentral bukan hanya harapan para guru tetapi juga selaras dengan harapan pegawai negeri dan kaum Manipolis pada umumnya.<sup>44</sup>

Tidak hanya di pusat Jakarta, dukungan lain juga datang dari pengurus PGRI di daerah khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mendukung berdirinya PGRI Non-Vaksentral / PGRI di bawah Soebandri dan PKI sebagai pendukungnya. Di Semarang dan Surabaya pengurus PGRI menyatakan dukungannya dengan berdirinya PGRI Non-Vaksentral dan mendukung penuh kegiatan serta langkah dari PGRI pimpinan Soebandri. Alasan kedua pengurus daerah PGRI tersebut sama yaitu menganggap Subiadinata dan kawan-kawannya telah menyeleweng dari hasil kongres PGRI ke-10 tahun 1962 dan menunjukkan sikap menolak terhadap sistem pendidikan Pantjawardhana yang secara jelas disetujui oleh Presiden Soekarno. PGRI Semarang bahkan menyatakan bahwa M.E Subiadinata telah memperkosa

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.228.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.229.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> “RKS Pusat sambut Berdirinya PGRI non-vaksentral”, *Harian Rakjat*, Sabtu 13 Juni 1964

keputusan kongres ke-X PGRI.<sup>45</sup> Partindo sebagai salah satu partai besar pada saat itu juga mendukung didirikannya PGRI Non-Vaksentral.

Partindo menyatakan bahwa PGRI telah mengalami kristalisasi manipolis dan mendukung bahwa PGRI telah dimasukkan ke dalam SOKSI (Serikat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) dan menyatakan keterkejutannya kepada Subiadinata yang diam seribu bahasa ketika tokoh dan rakyat lain gencar melawan Kapitalisme. Sejak terpecah dan berdiri dengan nama PGRI Non-Vaksentral setiap daerah yang mendukung mulai mendirikan kantor cabang, seperti di Jawa Barat akan didirikan kantor cabang PB PGRI Non-Vaksentral di daerah Tjiamis, Sumedang, Garut, Sukabumi, Tjianjur, dan Karisidenan Tjirebon.<sup>46</sup>

Perpecahan PGRI telah menyentuh daerah dan membuat situasi pendidikan khususnya kalangan pengajar terjebak dalam dilema ideologi atau tidak tahu harus mendukung dan berbuat seperti apa dalam situasi pendidikan saat itu. Sebagai contoh perpecahan jelas terlihat ditubuh PGRI Jawa Barat. Media di bawah naungan PKI menyebutkan bahwa beberapa PGRI daerah Jawa Barat mendukung berdirinya PGRI Non-Vaksentral, tetapi hal itu dibantah oleh pimpinan pengurus besar PB PGRI Jawa Barat, Basjuni Suriamihardja. PB PGRI Jawa Barat menyatakan dengan tegas bahwa tetap taat kepada PGRI yang sah. PB PGRI Jawa Barat menyampaikan seruannya kepada semua anggota yang ada di bawahnya agar semua tetap tenang dan senantiasa waspada dalam menghadapi persoalan yang dihadapi PGRI dan menganjurkan agar semuanya tetap menunggu intruksi dari pengurus pusat Jawa Barat.<sup>47</sup>

Langkah PGRI Non-Vaksentral untuk mempertegas keberadaan dan posisinya di dalam tubuh PGRI dilakukan dengan berbagai cara. Selain mengumpulkan dukungan dari berbagai daerah yang pro dengan PGRI Non-Vaksentral di bawah Soebandri dan dengan dimotori PKI, mereka juga mencari dukungan dari pejabat pemerintahan. PB PGRI Non-Vaksentral juga menemui menteri P.D & K Priyono bukan untuk membahas menyelesaikan urusan yang ada di dalam tubuh PGRI namun justru menjabarkan rencana jangka pendek serta jangka panjang yang akan dilakukan PGRI Non-Vaksentral. Menteri P.D & K juga ikut larut dalam pembahasan PB PGRI Non-Vaksentral. Dengan demikian, dapat terlihat arah pendidikan yang dibawa

menteri Priyono saat itu. Dalam pertemuan akhirnya dinyatakan bahwa PB PGRI Non-Vaksentral tidak lagi mengakui PB PGRI dibawah pimpinan Subiadinata cs.<sup>48</sup>

Pecahnya PGRI menjadi dua kubu adalah salah satu imbas dalam polemik pelaksanaan Sistem Pendidikan Pantjawardhana serta berbedanya pandangan terhadap Pancasila, Manipol dan USDEK terhadap dunia pendidikan. Dampak dan kerugian sangat besar dirasakan dalam dunia pendidikan, bukan hanya dampak materil melainkan yang paling besar adalah dampak Ideologis. Pendidikan pada saat itu yang seharusnya berfokus dalam pembentukan lulusan yang memiliki jiwa patriotik dan cinta tanah air untuk mendukung adanya Revolusi justru sibuk dalam adu argumen mengenai landasan pelaksanaan pendidikan. Dalam situasi yang demikian semua penafsiran Pancasila dilakukan melalui kacamata Manipol, pada gilirannya semua apa yang dikembangkan dalam pandangan manipol dijadikan warna dalam pengembangan pendidikan, artinya warna Manipol lebih menonjol dan yang digunakan dalam mengembangkan pendidikan.<sup>49</sup>

## 2. Rusuh di Dalam Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan

Panasnya persaingan kepentingan akan dunia pendidikan setelah pecahnya PGRI menjadi dua golongan semakin diperparah dengan adanya permasalahan di tubuh Dept. PP & K. Belum selesainya permasalahan terhadap PGRI, ketegangan semakin memuncak ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan reorganisasi Departemen kepada Presiden khususnya mengenai jumlah pembantu Menteri yang semula tiga orang menjadi dua orang.<sup>50</sup> Tindakan Menteri tersebut mendapat reaksi keras dan menimbulkan kehebohan di dunia pendidikan nasional. Tidak hanya organisasi dibidang pendidikan beberapa ormas juga memprotes dengan keras tindakan menteri tersebut serta memperkeruh suasana dalam pendidikan yang beberapa saat telah heboh dengan pecahnya PGRI menjadi dua golongan.

Berawal dari pidato inagurasi Dr. Busono Wiwoho pada rapat Majelis Pendidikan Nasional (Mapenas) dalam kedudukannya sebagai wakil ketua, menyarankan agar Pantjawardhana diisi dengan Moral Pantjatjinta.<sup>51</sup> Isi pidato tersebut menimbulkan kegelisahan dikalangan pejabat Departemen Pendidikan Pengajaran dan

<sup>48</sup> "PB PGRI Non-Vaksentral Temui Menteri Priyono", *Berita Indonesia*, Sabtu 20 Djuni 1964

<sup>49</sup> Helius Sjamsudin dkk, *Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945 - 1966)*, (Jakarta : Depdikbud, 1983), hlm. 81.

<sup>50</sup> Umasih., *Op.Cit*, hlm. 230.

<sup>51</sup> M Rusli Yunus, Rindorindo dkk, *Perjalanan PGRI (1945 - 2003) Menyongsong Kongres PGRI XIX di Semarang, 8-12 Juli 2003*, (Jakarta : Penguru Besar PGRI & Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003). Hlm 36.

<sup>45</sup> " PGRI Semarang Dukung PB PGRI Non-Vaksentral", *Harian Rakjat*, 18 Juni 1964

"PGRI Djatim Dukung Subandri", *Harian Rakjat*, 22 Juni 1964

<sup>46</sup> "Sekitar Perjataan Pengurus Daerah IV PGRI Djakarta", *Berita Indonesia*, Jum'at 19 Juni 1964

<sup>47</sup> "PGRI Djabar Tetap Taat Pada PB PGRI Jang Sjah", *Berita Indonesia*, 12 Juni 1964

Kebudayaan termasuk di dalam tubuh PGRI karena menyangkut tentang jalannya pendidikan nasional. Usaha untuk memasukkan nilai moral Pantjatjinta kedalam pendidikan dan sistem pendidikan Pantjawardhana telah sampai kedalam tubuh lembaga tinggi pendidikan yaitu Dept. PP & K. Ketagangan semakin meruncing ketika rapat kerja dinas pada 23 Juli 1964 Menteri PP & K Prijono membahas dan memancing kembali persoalan tersebut disertai tuduhan kepada pembantu menteri, Tartib Prawirodihardjo. Pembantu menteri tersebut dituduh telah mengkhianati menteri serta mendukung golongan yang rekasioner dalam melawan Pantjawardhana serta Pantjatjinta.

Keputusan Presiden No. 187 / 1964 dan No. 188 / 1964 tanggal 4 Agustus 1964 yang diambil atas usul Menteri P & K ( perubahan dari PP & K sejak 1964) tanggal 29 Juli 1964 No. 17985/S tentang reorganisasi Departemen P & K yang mengubah pembantu menteri dari tiga orang menjadi dua orang.<sup>52</sup> Hal ini membuat khawatir pejabat tinggi Departemen P & K karena menganggap tidak ada sama sekali jaminan dan kepastian mengenai hukum dan karir mereka dalam bekerja mengabdikan dalam bidang pendidikan. Hasilnya kemudian sebanyak 28 pejabat tinggi Departemen P & K mengirim surat ke Menteri Prijono dengan maksud untuk memulihkan keadaan dan mendapat keterangan lebih lanjut, namun justru ditanggapi Menteri dengan memecat 27 pejabat tersebut dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan atas permintaan pribadi ke-27 pejabat tinggi tersebut.

Tindakan Menteri Prijono tersebut mendapat tentangan keras berbagai ormas dan perwakilan dari Dinas P & K atas pemberhentian ke-27 pejabat tinggi Departemen P&K. Sementara itu fraksi PGRI Non-Vaksentral dan serikat kerja justru malah sebaliknya yaitu mendukung atas pemecatan ke-27 pejabat tinggi Departemen P & K. Meskipun mendapat tentangan dari kalangan luas posisi Prijono dalam pemerintah justru semakin kuat karena setelahnya Menteri Prijono menjadi Menteri Koordinator Pendidikan & Kebudayaan. Hal ini disambut baik dan penuh suka cita dari pengurus PGRI Non-Vaksentral, PKI serta ormas dan serikat guru yang pro dan mendukung sistem pendidikan Pantjawardhana dengan isi moral pendidikan dengan nilai Pantjatjinta. 27 pejabat tinggi Departemen P & K selanjutnya di tampung oleh Markas Besar TNI Angkatan Darat sejumlah 24 orang dan tiga orang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.

Penjelasan Menteri Prijono terhadap masyarakat luas melalui media menjelaskan bahwa ke-28 pejabat yang mengirim surat ke Menteri Prijono atas tindakan

Tartib Prawirodihardjo yang meninggalkan ruang rapat pada rapat dinas 23 Juli 1964 adalah atas permintaan sendiri. Bahkan Menteri Prijono menyatakan, diantara 28 orang yang menandatangani surat tersebut terdapat kira – kira delapan orang bekas anggota partai terlarang dan tujuh orang petugas yang tatkala perjuangan fisik revolusi Indonesia melakukan penyebrangan dan kolaborator dengan Belanda, tidak hanya itu diantara mereka juga terdapat bekas pegawai – pegawai USIS (*United States Information Service*).<sup>53</sup> Pernyataan yang dilontarkan Menteri Prijono dibantah langsung oleh Tartib Prawirodihardjo dan menantang untuk menunjuk dan menyebutkan yang mana oknum yang dimaksud oleh Menteri Prijono.

Saling serang di tubuh Departemen P & K baik melalui pernyataan langsung maupun media berdampak luas di luar Departemen. Reaksi golongan dan ormas terhadap kisruh yang terjadi di tubuh Departemen P & K mengenai pembahasan sistem pendidikan Pantjawardhana dan menyangkut nilai moral Pantjatjinta terjadi beberapa macam suara, ada yang mendukung dengan menyuarakan dukungannya melalui media ada juga yang menentang tindakan Menteri Prijono. Seperti yang dilakukan Pimpinan Serikat Sekerja Pendidikan Jakarta Raya dan bekerjasama dengan Pimpinan Pusat Serikat Sekerja Pendidikan agar membebaskan ke-28 pejabat tinggi tersebut dari tugas – tugasnya dan melakukan pembebasan tersebut secepatnya agar aparatur P & K semakin kompak dibawah pimpinan Menteri Prijono.<sup>54</sup> Alasan utamanya adalah agar Manipol tetap dilaksanakan kepada semua aparatur P & K baik dari pusat hingga ke daerah – daerah dan menghentikan semua individu yang berusaha menghalangi tekad tersebut.

## KESIMPULAN

Pendidikan tidak lagi berfokus pada pelaksanaan pendidikan namun justru lebih berfokus pada adu argumen mengenai pelaksanaan Manipol yang tepat bagi pendidikan. Pendidikan pada saat itu mulai diintervensi kepentingan banyak pihak dan golongan yang memiliki kepentingan terhadap negara dan pendidikan. Kelompok dan golongan mulai banyak memunculkan nilai dan asas pendidikan mereka sebagai tafsiran dari sistem pendidikan Pantjawardhana bahkan dalam pelaksanaannya dipaksa sejalan dengan Pantjawardhana (Pantjatjinta sebagai salah satu contoh kuat).

Pantjatjinta sebagai asas dari lembaga swasta bidang pendidikan (LPN) banyak disoroti oleh

<sup>53</sup> “ 28 Orang Petugas PDK Minta Dinon Aktipkan”, *Merdeka*, Senin 24 Agustus 1964

<sup>54</sup> “ Manipolkan Aparat Dep. P. D. & K.”, *Merdeka*, 22 Agustus 1964

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

masyarakat luas karena kedekatan LPN dengan Dept. P.D & K dan mencurigai ada maksud dan kepentingan lain dari Lembaga Pendidikan Nasional. Dalam pelaksanaan Pantjawardhana selalu dikaitkan dengan nilai Pantjatjinta dan hal tersebut yang membuat masyarakat khususnya tenaga pengajar banyak yang menentang. Alhasil akibat perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pelaksanaan Manipol yang tepat dalam bidang pendidikan serta ambisi golongan yang memiliki kepentingan terhadap pendidikan membuat pendidikan saat itu terpecah suara. Keretakan terjadi tidak hanya pada lembaga bahkan seluruh tenaga pengajar atau guru dan sekolah mengalami perbedaan suara. Ada golongan yang mendukung Pantjawardhan dan Pantjatjinta dan golongan yang menolak dan menyuarakan kembali ke Pancasila sebagai dasar pendidikan. Hal ini juga dialami oleh lembaga vital dibidang pendidikan seperti Dept. P.D & K serta PGRI sebagai organisasi utama pendidikan dan tenaga pengajar.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Dokumen :

Dokumen Pernyataan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PERHIMI) Tjabang Malang, Djakarta 27 November 1964.

Dokumen Pernyataan Gerakan Karyawan Guru Pantjasila, Djakarta 12 Djuli 1964

##### Majalah :

*Pendidikan Nasional*, No 1 – 2, Tahun 1962.

*Pendidikan Nasional*, No 5-6, Tahun 1962

*Pendidikan Nasional*, No. 11-12, 1962

*Pendidikan Nasional*, No 7- 8 ,1963

*Pendidikan Nasional*, Tahun III No 9-10, 1964

*Pendidikan Nasional*, Tahun IV No 1-2, 1965

##### Surat Kabar :

*Berita Indonesia*, 19 Mei 1964

*Berita Indonesia*, 12 Juni 1964

*Berita Indoneisa*, 19 Juni 1964

*Berita Indonesia* , 20 Djuni 1964

*Duta Masyarakat*, 1 Juli 1964

*Duta Masyarakat*, 2 Djuli 1964

*Duta Masyarakat* , 4 Juli 1964

*Duta Masyarakat*,5 Djuli 1964

*Duta Masyarakat*, 10 Juli 1964

*Duta Masyarakat* , 7 Juli 1964

*Duta Masyarakat* , 11 Juli 1964

*Merdeka* , 4 Juli 1964

*Merdeka*, 22 Agustus 1964

*Merdeka*, 24 Agustus 1964

*Harian Rakjat*, 13 Juni 1964

*Harian Rakjat*, 18 Juni 1964

*Harian Rakjat* , 22 Juni 1964

*Suluh Indonesia (Sulindo)*, 8 Oktober 1960

*Suluh Indonesia (Sulindo)*, 18 Januari 1961

*Suluh Indonesia (Sulindo)* , 8 Maret 1961

*Suluh Indonesia (Sulindo)*, 26 Oktober 1960

*Suluh Indonesia (Sulindo)*, 5 November 1960

*Suluh Indonesia (Sulindo)*, 8 Juli 1963

*Suluh Indonesia (Sulindo)*, 3 Agustus 1963

*Suluh Indonesia (Sulindo)*, 8 Agustus 1963

*Suluh Indonesia (Sulindo)*, 17 Juli 1964

*Suluh Indonesia (Sulindo)*, 24 Agustus 1964

##### Buku :

C.D. Rowly. 1982. *Politik Perencanaan Pendidikan di Negara Berkembang*, terj. Ny. U.S. Hardjolukito. Jakarta : PT Bhatara Karya Aksara & Unesco.

Feith, Herberth. 1988. *Indonesian Politichal Thinking 1945 – 1965*. Di terjemahkan oleh : LP3ES. Jakarta : LP3ES

H.A.R Tilaar. 2003. *Kekuasaan & Pendidikan (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural)*. Yogyakarta : Indonesia Tera

\_\_\_\_\_ . 2008. *Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik)*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

James Spradley. 1980. *Participant Observation*. New York : Holt, Rineheart and Wiston,

Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya : Unesa University Press

Lembaga Pendidikan Nasional. 1963. *Seminar Pendidikan Mengabdikan Manipol*. Jakarta : Lembaga Pendidikan Nasional.

M Rusli Yunus, Rindorindo dkk. 2003. *Perjalanan PGRI (1945 – 2003) Menyongsong Kongres PGRI XIX di Semarang, 8-12 Juli 2003*. Jakarta : Penguru Besar PGRI & Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Muhammad Rifai. 2011. *Politik Pendidikan Nasiona*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media

Mukhrizal Arif Dkk. 2014. *Pendidikan Posmodernisme*, Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA

Paulo Freire. 2000. *Politik Pendidikan (Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan)*. terj. Agung Prihantoro dan Fuad arif, dari judul asli, *The Politic of Education (Culture, Power, and Liberatio*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

S.F Yupon. 1960. *Logat U.S.D.E.K*. Surabaya : Redjeki

Salim, Agus, Dkk. 2007. *Indonesia Belajarlah (Membangun Pendidikan Indonesia)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNS & Penerbit Tiara Wacana

Samsjudin, Heliuss. 1983. *Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945 – 1966)*. Jakarta : Depdikbud

Umasih. "Penyusupan Komunisme dalam Pelaksanaan Pendidikan Pancawardhana". Dalam Sostrodinamo dan Hisyam. 2013. *Historitas Kebangsaan dan Demokrasi*. Jakarta : Depdikbud  
Windhu Marsana. 1992. *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta : Kanisius

**Jurnal:**

Umasih. 2014. *Ketika Kebijakan Orde Lama Memasuki Domaian Pendidikan : Penyiapan dan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Indoneisa*. Jurnal Paramita. 24( 1), 104-113.



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA